

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anderson, James E. (1976). *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinkart and Winston.
- Barnes, R.S.K and R.N. Huges. (1988). *An Introduction to Marine Ecology*. 2nd edition. Oxford: Balckwell Scientific. 351 halaman
- Octavian, A. & Yulianto, B,A. (2014). *Budaya, Identitas dan Masalah Keamanan Maritim: Praktik Melaut di Ujung Kulon*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Buzan, B. (1991). *People, States, and Fear Second Edition: An Agenda International Security Studies in The Post-Cold War Area*. Harlow: Prentice Hall.
- Buzan, Barry., Waever, Ole., Wilde, Jaap de. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. United States of America: Lynne Rienner Publisher.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chris Rahman (2009). *Concepts of Maritime Security*, New Zealand: Centre for Strategic Studies.
- Departemen Pertahanan. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- (2008). *Hakikat Ancaman*. In Dephan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (p. 27). Jakarta.
- Dunn, William N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*, Englewood Cliff. Prentice Hall, Inc.

- [FAO] Food and Agriculture Organisation, (2001). International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Rome. 24p.
- [FAO] Food and Agriculture Fisheries Departemen, (2002). Implementational of the International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No.9 Rome, 122p.
- Gordon, A.L. (2005). Oceanography of the Indonesian Seas and Their Throughflow. Journal of Oceanography. USA: The Oceanography Society. 18 (4): 15 -20.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2014) Profile Perikanan Tangkap Indonesia. Jakarta.
- Kirk, J.T.O. (1994). Light and photosynthesis in aquatic ecosystem. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 509 halaman.
- Klein, Natalie, et al, (2010), Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand, New York, Routledge.
- Koesoema, YA. Tisnanta. Prayoga, S. (2014) Pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan Terhadap Pengendalian Sumberdaya Perikanan di Kota Bandar Lampung. Lampung.
- Marsetio. (2014). Sea Power Indonesia . Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Marsetio. (2014). TNI Angkatan Laut Berkelas Dunia: Paradigma Baru. Jakarta: Markas Besar TNI Angkatan Laut.
- Miles, M., & Huberman, A. (1984). Qualitative Data Analysis: A SourceBook of New Methods. California: SAGE Publications.

- Nontji, A. (1984). Biomassa dan Produktivitas Fitoplankton di Perairan Teluk Jakarta Serta Kaitannya dengan Faktor-Faktor Lingkungan. Bogor: Laporan Penelitian Fakultas Perikanan IPB.
- Nontji, A. (2002). Laut Nusantara. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Nugroho, Dr. Riant. (2009). Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan - Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan, Public Policy. Edisi Revisi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. (2016). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara. Pemprov Kalimantan Utara.

### **Jurnal**

- Adnan. (2010). Analisis Suhu Permukaan Laut dan Klorofil-A Data Inderaja Hubungannya dengan Hasil Tangkapan Ikan Tongkol (*Euthynnus affinis*) di Perairan Kalimantan Timur. Ambon. Jurnal Amanisal FPIK Unpatti Ambon
- Almuzammil. (2016). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing Pada Tahun 2014-2015. Riau : Universitas Riau
- Ardiwijaya R.R. (2002). Distribusi Horizontal Klorofil-a dan Hubungannya dengan Kandungan Unsur Hara serta Kelimpahan Fitoplankton di Teluk Semangka, Lampung. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Arsjad, A.B.S.M., Y. Siswanto dan R.S. Dewi. (2004). Intervariasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup: Sebaran Klorofil-a di Perairan Indonesia. Jakarta: Pusat Survei Sumberdaya Alam Laut, BAKOSURTANAL.

- Bendar, A. (2015). *Illegal Fishing Sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa*. Ternate : Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
- Biasane, D. I. (2009). *Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bungin, Burhan, (2012), *Analisa Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Gaol, J. L dan B. Sadhotomo. (2007). *Karakteristik dan Variabilitas Parameter Oseanografi Laut Jawa Hubungannya dengan Distribusi Hasil Tangkapan Ikan*. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*. 13 (3): 201-211.
- Sinulingga, A. (2016). *Penanganan Illegal Fishing di Perairan Indonesia, Studi Kasus: Illegal Fishing Periode 2009-2014*. Jakarta. Universitas Pertahanan Indonesia
- Susanto, R.D., T.S. Moore II dan J. Marra. (2006). *Ocean Color Variability in the Indonesian Seas During the SeaWiFS era*. *Geochem. Geophys. Geosyst.*, 7, Q05021, doi: 10.1029/20055GC001009.
- Syetiawan, A. (2015). *Penentuan Zona Potensi Penangkapan Ikan Berdasarkan Sebaran Klorofil-A*. Bogor: Badan Informasi Geospasial.
- Widodo, J. (1999). *Aplikasi Teknologi Penginderaan Jauh untuk Perikanan di Indonesia*. *Prosiding Seminar Validasi Data Inderaja untuk Bidang Perikanan*. Jakarta 14 April 1999. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta. ISBN;979-95760-1-6. (II-1-II-21).

Winarso, G. dan Kurniawan, E. (2014). Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Untuk Mendukung Perencanaan Operasi Keamanan Laut di Laut Arafuru (Reote Sensing Application for Supporting Maritime Security Operations at Arafuru Sea). Jakarta. Jurnal Penginderaan Jauh Vol. 11 No. 2.

### **Dasar Hukum**

Pasal 66 UU 45 Tahun 2009,

Perpres No.63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta, Permen KP No.23/PERMEN-KP/2015

UU No. 34 tahun 2004 pasal 9 tentang TNI pada pasal 17, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang KUHAP

Perpres RI No.178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut

Pasal 13 dan 14 huruf G UU No.2 tahun 2002 tentang Polri dan keputusan Mendagri No.4/2/3/Um